

PEMIKIRAN ALI SYARI'ATI TENTANG *IMAMAH*

Oleh **Agustina Damanik**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
e-mail : agustinadamanik32@gmail.com

Abstract

This research moved from one of the Shiite leaders are fairly well known and influential in religious thought among Shi'ite, namely Ali Syariati. He is one of the thinkers who seek to understand Islam from the sociological point of view, not only from the standpoint of normative. One of the characteristic of the Shi'ite doctrine is the Imamah (leadership) concept, which is a sensitive issue and a long debate in the history of cross pentig in Islam. Shiites come since the early days of Islam was born, which until now one of the schools that still exists and continues. In this study the authors will discuss Ali Syariati's thought about the concept of the Imamah. This study is a research library (library research) try to decipher Ali thinking about the problem Imamah (leadership) using the method of historical research, which meliputi beberapa hal, namely heuristic, interpretation, and last historiografi. The results showed that according to Ali, Islam is not a religion that hanya memperhatikan spiritual and moral aspects or just antrata servant relationship with the creator of universe (Hablu min Allah), but more than that, Islam is an ideology of emancipation and liberation. He believes that Islam as a school of sociology of science should function as a revolutionary force to liberate oppressed people, both culturally and politically. Imamah is a progressive and revolutionary leadership that can guide man and to build a society on the foundation of a true and strong, which will lead to the awareness, growth, and independence in making decisions. Imamate is a manifestation of "the minutes of the leadership and guidance of the individual and society" from "what already exists" (das sein) to "what should be" (das sollen) as much as possible is usually done. Imamate is meant here is not a super-human, but a human being that has many advantages over other human or superhuman in tune with the demands of human morals to the life and needs of individuals and society both intellectually and sociologically.

Kata Kunci : Pemikiran, Ali Syari'ati, Imamah

A. Pendahuluan

Pada tataran normatif, studi Islam nampaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantis dan apologis, sehingga kadar muatan analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama

dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah keagamaan produk sejarah masa lampau masih kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu yang masih sangat terbatas.

Disini pemahaman Islam yang ditawarkan Ali Syari'ati berbeda dengan pemahaman mainstream saat itu. Islam yang dipahami banyak orang di masa Syari'ati adalah Islam yang hanya sebatas agama yang berhubungan dengan ritual-ritual formal yang tidak menjangkau persoalan-persoalan politik dan sosial kemasyarakatan. Islam hanyalah sekumpulan dogma untuk mengatur bagaimana cara beribadah tetapi tidak menyentuh sama sekali cara yang paling efektif untuk menegakkan keadilan, strategi melawan kezaliman atau petunjuk untuk membela kaum tertindas (*mustadz'afin*).¹ Islam yang demikian inilah yang dalam banyak kesempatan sangat menguntungkan pihak penguasa yang berbuat sewenang-wenang dan mengumbar ketidakadilan serta menzalimi sesama karena ia bisa berlindung di balik dogma-dogma yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya.

Islam dalam pandangan Ali Syari'ati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hanya sekedar

¹ Dalam istilah Al-Qur'an, *istid'af* (kata kerja dari *mustad'afin*) bukan berarti kelemahan atau keputusasaan. Itu merupakan katajadian yang sama dengan *istibdad* (despotisme), *isti'mar* (kolonialisme), *istismar* (eksploitasi), dan seterusnya. Dalam kenyataannya, yang terakhir itu merupakan bentuk-bentuk *istid'af* (penindasan) yang telah terjadi diberbagai masa sejarah. Setiap kali rakyat dibiarkan lemah secara ekonomis (eksploitasi). Politis (despotisme. Nasionalis (kolonialisme), dan kultural (pelumpuhan), entah di dalam satu bidang ini atau gabungan di antaranya, maka terjadilah *istid'af* dan korban-korban dinamakan *mustad'afin* yang tertindas). Lihat Ali Syari'ati, *What Is To Be Done: The Enlightened and Thinkers and Islamic Renaissance*. Terj. Farhang Rajaee (Houston: IRIS,1996) hal. 1-2 diakses dari www.shariati.com

hubungan hamba dengan Sang Khaliq (*Hablu min Allah*), tetapi lebih dari itu. Islam adalah sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan.² Ia berkeyakinan bahwa Islam sebagai suatu mazhab sosiologi ilmiah harus difungsikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat tertindas, baik secara kultural maupun politik.¹

Lebih lanjut, Ali Syari'ati memberikan gambaran tentang Islam pembebasan adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali kepada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan. Islam Abu Zar atau Islam Marwan bin Affan, sang penguasa. Keduanya disebut Islam, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Satunya adalah Islam kekhalifahan, istana dan penguasa. Sedangkan lainnya adalah Islam rakyat, mereka yang dieksploitasi dan miskin. Selanjutnya, tidak cukup syah dengan sekadar berkata, bahwa orang harus mempunyai kepedulian (*concern*) kepada kaum miskin dan tertindas. Khalifah yang korup juga berkata demikian. Islam yang benar lebih dari sekadar kepedulian. Islam yang benar memrintahkan kaum beriman berjuang untuk keadilan. Persamaan dan penghapusan kemiskinan.²

² Azyumardi Azra, *Akar-akar Ideologis Revolusi Iran: Filsafat Pergerakan Ali Syari'ati*, dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Islam Politik: Dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 77

Islam pembebasan adalah Islam yang diwariskan oleh Imam Husein, kesyahidannya di Karbala menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang tertindas untuk memelihara Islam yang otentik. Islam yang demikian adalah Islam Syi'ah awal, yakni Islam Syi'ah revolusioner yang di personifikasikan Abu Zar al-Ghifari, dan Imam Husein dengan kesyahidannya. Keduanya merupakan simbol perjuangan abadi ketertindasan melawan penguasa yang zalim. Islam Syi'ah revolusioner ini kemudian mengalami penjinakan di tangan kelas atas penguasa politik dan ulama yang memberikan legitimasi atas Islam versi penguasa. Ulama, menurut Ali Syari'ati, telah menyunat Islam dan melembagakannya sebagai pemenang (*pacifier*) bagi massa tertindas, sebagai dogma kaku teks skriptural yang mati. Ulama bergerak seolah-olah di dalam kevakuman, terpisah dari realitas sosial.³

Kenyataan ini, menurut Ali Syari'ati, misalnya terlihat pada masa Safawi, dimana dinasti penguasa memasyarakatkan Syi'isme versi mereka sendiri yang sangat berbeda dengan Syi'ah Imam Ali dan Imam Husein. Syari'ati, menyebut jenis Syi'ah penguasa sebagai Syi'ah Hitam (*Black Shi'ism*), dan Syi'ah Imam Ali sebagai Syi'ah Merah (*Red*

Shi'ism), yakni Syi'ah kesyahidan (*Shi'ismnof martyrdom*).

Menurut pengamatan Syari'ati, selama 7 abad sampai masa Dinasti Safawi, Syi'isme (*Alawi*) merupakan gerakan revolusioner dalam sejarah yang menentang seluruh rezim otokratik yang mempunyai kesadaran kelas seperti Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ghaznawiyah, Saljuk, Mongol, dan lain-lain. Dengan legitimasi ulama, rezim-rezim ini menciptakan Islam sunni versi mereka sendiri. Pada pihak lain, Islam Syi'ah merah, seperti sebuah kelompok revolusioner, berjuang untuk membebaskan kaum yang tertindas pencari keadilan. Syari'ati melihat rezim dan lembaga keulamaan, yang bisa jadi terkadang ditunggangi pihak luar, sebagai manipulator masa lampau Iran dan arsitek yang menjadikan tradisi menjadi penjara. Rezim Syah Iran tidak membangkitkan agama, tetapi mempertahankan status quo, sementara para ulama mempertahankan kemerdekaan Islam.

Menurut Syari'ati, apa yang terjadi di Iran adalah bahwa di satu sisi, para ulama yang menjadi pemimpin agama selama dua abad terakhir telah mentransformasikannya menjadi bentuk agama yang kian mandek, sementara di sisi lain orang-orang yang tercerahkan memahami kekinian dan kebutuhan generasi dan zaman, tidak memahami agama. Akhirnya, kata Syari'ati, Islam sejati tetap tak diketahui dan tersembunyi dalam relung-relung sejarah.

³ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam*, hal. 136-138.

Gagasan Syari'ati tentang Islam revolusioner atau Islam pembebasan sejalan dengan gagasan tentang teologi pembebasan (*theology of liberation*) yang banyak diusung oleh tokoh-tokoh revolusioner baik di Amerika Latin maupun Asia. Asghar Ali Engineer, misalnya mengatakan bahwa, sebagaimana yang telah terekam dalam sejarah Islam, kedatangan Islam adalah untuk mengubah status quo serta mengentaskan kelompok yang tertindas dan menghentikan eksploitasi terhadap minoritas, mereka inilah yang disebut dengan kelompok masyarakat lemah. Masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota yang lainnya yang lemah dan tertindas, tidak disebut sebagai masyarakat Islam (*Islamic Society*), meskipun mereka menjalankan ritualitas Islam.

Ajaran Nabi menyatakan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, dan menyuruh umatnya untuk berdoa kepada Allah agar dapat terhindar dari keduanya. Penghapusan kemiskinan merupakan syarat bagi terciptanya masyarakat Islam. Dalam hadis lain Nabi menyatakan, bahwa sebuah negara dapat bertahan hidup walau di dalamnya ada kekufuran, namun tidak bisa bertahan jika di dalamnya terdapat *zalim* (penindasan).⁴

⁴ Dikutip dari Muhammad Nafis "Dari Cengkraman penjara Ego memburu Revolusi: Memahami Kemelut Tokoh Pemberontak", dalam M. Deden Ridwan (ed). *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia* (Jakarta: Lentera, 1999) hal. 61

Memang sangat riskan, sebagaimana yang telah digelisahkan oleh Syari'ati. Islam yang bersifat revolusioner ini segera menjadi agama yang kental dengan *status quo*. Islam sarat dengan praktek feodalisme dan para ulama justru menyokong kemapanan yang sudah kuat itu. Mereka lebih banyak menulis buku tentang kaidah-kaidah ritual dan menghabiskan energinya untuk menghapus masalah-masalah *furu'iyah* dalam syari'at, dan sama sekali mengelincirkan arti fitil Islam dengan menciptakan keadilan sosial dan kepedulian Islam yang aktif terhadap kelompok yang lemah dan tertindas (*mustad'afin*). Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai *mustakbirin* (orang yang kuat dan sombong).

Dari latar belakang di atas, Syari'ati berusaha merumuskan ideologi Islam dengan menunjukkan karakteristik revolusioner Islam. Ia berupaya membuktikan bahwa Islam agama yang sangat progresif, agama yang menentang penindasan. Syari'ati sangat antusias untuk membuktikan perlunya suatu reformasi bagi pemahaman Islam yang benar, sehingga dibutuhkan figur-figur yang mampu memimpin masyarakat kepada perubahan paradigma dan mental masyarakat. Mereka itulah yang menurut Syari'ati disebut para pemikir tercerahkan (*rausan fikr*).⁵

Untuk mengkontruksi Islam sebagai sebuah ideologi, mula-mula Syari'ati

⁵ Azyumardi Azra, *Akar-akar Ideologi Revolusi Iran*, hal. 77-78

melakukan identifikasi tentang pemahaman ideologi itu sendiri, Syari'ati menjelaskan bahwa ideologi terdiri dari kata "ideo" yang berarti pemikiran, gagasan, konsep, keyakinan dan lain-lain, dan kata "logi" yang berarti logika, ilmu atau pengetahuan. Sehingga ideologi dapat diartikan ilmu tentang keyakinan dan cita-cita. Menurut pengertian ini seorang ideologi adalah seorang pembela suatu ideologi atau keyakinan tertentu.⁶

Dalam kaitan ini, ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, suatu kelas sosial atau suatu bangsa.³ Untuk mencapai tujuan menggerakkan masyarakat melalui ideologisasi Islam, Syari'ati menempuh beberapa langkah strategis. Syari'ati berupaya untuk melakukan redefinisi Islam dengan menyajikan tahapan-tahapan ideologi secara detail, berkenaan dengan cara memahami Tuhan, mengevaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan ide-ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental kognitif masyarakat, serta metode atau usulan-usulan praktis untuk mengubah *status quo* yang tidak memuaskan kehendak masyarakat.⁴

Pada tahap pertama, Syari'ati meletakkan pandangan dunia tauhid sebagai pandangan dasar. Pandangan ini menyatakan secara langsung bahwa kehidupan merupakan

bentuk tunggal, organisme yang hidup dan sadar, memiliki kehendak, intelijen, perasaan dan tujuan. Hal demikian berbeda dengan pandangan dunia yang membagi kehidupan dalam katagori yang berpasangan, dunia dan alam kekal, fisik dan gaib, substansi dan arti, rohani dan jasmani.⁷ Tahap kedua, adalah berkenaan dengan bagaimana memahami dan mengevaluasi pemikiran dan segala sesuatu yang membentuk lingkungan sosial dan mental.

Bagi Syari'ati Islam adalah pandangan dunia yang bisa dipahami dengan mempelajari Al-Qur'an sebagai kumpulan ide-ide dan mempelajari sejarah Islam sebagai ringkasan kemajuan yang pernah dialami dari permulaan misi Nabi sampai pada dunia kontemporer.⁵ Pada tahap berikutnya, diperlukan suatu usaha bagaimana mencari dan menerapkan jalan yang praktis untuk menumbangkan *status quo*. Caranya ialah melengkapi masyarakat dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan, langkah-langkah praktis berdasarkan kondisi masyarakat, serta upaya menciptakan perubahan dan kemajuan dalam aksi-aksi revolusioner. Ideologi harus mengejawantahkan kaum yang menderita, bodoh dan lamban, agar bangun dan menegakkan hak-hak serta identitasnya.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal.17

⁷ *ibid*

B. Konsep Imamah dalam Pandangan Ali Syari'ati

1. *Ummah*

Syari'ati memulai konsep imamah dengan terlebih dahulu menerangkan makna *ummah* karena, baginya tidak ada keterpisahan antara *ummah* dan imamah. Istilah *ummah* berasal dari kata *amma*, yang artinya *qasada* (bermaksud) dan *'azima* (berniat keras). Istilah *ummah* memiliki tiga pengertian, yakni “gerakan”, “tujuan”, dan “ketetapan hati yang sadar”. Kata tersebut memiliki empat arti, yaitu usaha, gerakan, kemajuan dan tujuan.⁸ Ia membandingkan istilah *nation*, *qaum*, *qabilah*, *sya'b* dan lainnya dengan *ummah*.

Bagi Syari'ati, istilah-istilah tersebut, dengan pengecualian pada istilah *qabilah* sama sekali tidak mengandung arti kemanusiaan yang dinamis. Hanya saja, kelebihan istilah *qabilah* ditemukan pula pada istilah *ummah*. Istilah yang terakhir ini masih memiliki kelebihan lain dibandingkan istilah *qabilah*, yakni *ummah* mempunyai gerakan yang mengarah pada tujuan yang sama. Dalam istilah *ummah*, gerak yang mengarah ke tujuan bersama itu justru merupakan landasan ideologis.⁹

Menurut Syari'ati, *nation*, *qaum*, *qabilah*, *sya'b* dan lainnya, seluruhnya

mengisyaratkan adanya komunitas manusia yang menonjolkan bentuk, karakteristik dan kondisi-kondisi lokalnya. Semua istilah tersebut statis dan tidak mengandung gerakan. Sedangkan *ummah*, sebagai suatu istilah, merupakan istilah yang dinamis. Menurut Ali Syari'ati, istilah *ummah* secara terperinci mengandung tiga konsep: kebersamaan dalam arah dan tujuan, gerakan menuju arah dan tujuan tersebut, dan keharusan adanya pimpinan dan petunjuk kolektif. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia merupakan refleksi akidah dan kebersamaan, yang mengharuskan mereka untuk bergerak menuju arah dan tujuan secara bersama-sama dan mempunyai seorang pemimpin yang bertanggung jawab yang bisa diterima oleh semua orang.

Dari pengertian tersebut, Syari'ati memandang bahwa sesungguhnya tidak mungkin ada *ummah* tanpa imamah. Dengan kata lain. Imamah merupakan refleksi tentang petunjuk kepada umat yang mengantarkan mereka sampai kepada tujuannya.¹⁰

2. Imamah

Menurut Syari'ati, ada dua permasalahan yang muncul dalam pembahasan tentang imamah. *Pertama*,

⁸ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 50

⁹ *Ibid.*, hlm. 45-50

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

tentang karakteristik imamah itu sendiri. *Kedua*, berkaitan dengan tatacara pemilihan imam (sebagai pemimpin komunitas) tersebut.¹¹ Tentang karakteristik imamah, Ali Syari'ati menjelaskan bahwa sebagaimana istilah *ummah*, istilah imamah menampakkan diri dalam bentuk sikap sempurna, di mana seseorang dipilih sebagai kekuatan penstabilan dan pendinamisan massa. Penstabilan berarti menguasai massa sehingga berada dalam stabilitas dan ketenangan, dan kemudian melindungi mereka dari ancaman, penyakit, dan bahaya. Pendinamisan berkenaan dengan asas kemajuan dan perubahan ideologis, sosial dan keyakinan, serta menggiring massa dan pemikiran mereka menuju bentuk ideal. Imamah dalam mazhab pemikiran Syi'ah, menurut Ali Syari'ati, adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan.¹² Jadi, imamah merupakan manifestasi dari "risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat" dari "apa yang

kini ada" (*das sein*) menuju "apa yang seharusnya ada" (*das sollen*) semaksimal yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas dasar konsep yang baku menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya.¹³

Namun demikian, bagi Syari'ati, imam bukanlah supra manusia tetapi manusia biasa yang memiliki banyak kelebihan di atas manusia super yang selaras dengan tuntunan manusia akan moral bagi kehidupan individu maupun masyarakat, serta selaras dengan kebutuhan intelektual dan psikologis.

Dengan demikian, tugas imam tidak hanya terbatas memimpin manusia dalam salah satu aspek politik, kemasyarakatan, dan perekonomian, juga tidak terbatas pada masa-masa tertentu dalam kedudukan sebagai panglima, amir atau khalifah, tetapi tugasnya adalah menyampaikan kepada umat manusia dalam semua aspek kemanusiaan yang bermacam-macam. Seorang imam dalam arti seperti ini, tidak terbatas hanya pada masa hidupnya, tetapi selalu hadir di setiap saat dan hidup selamanya.

Setelah menguraikan tentang karakteristik *imamah* dan hakekat imam, Syari'ati melanjutkannya dengan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53

¹² Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran Aksi* (Bandung: Mizan, 1992) hal. 65

¹³ *Ibid.*, hlm. 83

pertanyaan: “apakah imam dipilih melalui pengangkatan atau pemilihan, ataukah berdasarkan penunjukan dari Nabi SAW atau imam sebelumnya?” secara teoritis, menurut Syari’ati, adalah negatif untuk ketiga-tiganya, sebab ketiga bentuk tersebut muncul dari pemberian kekuasaan dan pengejawantahan hak dari luar diri orang yang dipilih, yakni pemilihan dari ‘atas’. Dari rakyat dalam sistem demokrasi, dan dari pewarisan yang muncul karena garis bapak atau ibu. Bagi Syari’ati, imam adalah suatu hak yang bersifat esensial yang muncul dari diri seseorang. Sumbernya adalah dari diri imam itu sendiri, dan bukan dari faktor eksternal, semisal pengangkatan atau pemilihan.

Dari tinjauan di atas, lanjut Syari’ati, *imamah* tidak diperoleh melalui pemilihan, melainkan melalui pembuktian kemampuan seseorang. Artinya, masyarakat yang merupakan sumber kedaulatan dalam sistem demokrasi tidak terkait dengan imam melalui ikatan pemerintah, tetapi berdasarkan ikatan orang banyak dengan kenyataan yang ada pada imam tadi. Mereka bukan menunjuknya sebagai imam, tetapi mengakui kelayakan sebagai seorang imam.

Selanjutnya, Ali Syariati menolak adanya pemisahan lapangan kerja antara imam (yang diakui) dengan khalifah (yang

dipilih) dalam bentuk yang aflikatif, karena akan bermuara kepada pemisahan antara agama dan negara. Kendati demikian, khalifah tidak selalu identik dengan *imamah*. Baginya, *imamah* terbatas hanya kepada pribadi-ribadi tertentu sebagaimana halnya dengan *nubuwwah*, sedangkan pemerintahan tidak terbatas pada masa, sistem dan orang-orang tertentu. Satu-satunya garis pemisah yang ditegakkan Syari’ati adalah, “pemerintahan (khalifah) itu merupakan tanggung jawab yang tidak terbatas dalam sejarah, sedangkan *imamah* terbatas, baik dalam masa maupun oarangnya. Dengan mengabaikan perbedaan tadi, *imamah* dan khalifah sebenarnya merupakan tanggung jawab yang satu, untuk mencapai tujuan dengan satu keterbatasan, seperti telah dikemukakan di atas, di mana seorang penguasa tidak selamanya seorang imam.

Selanjutnya ada dua persoalan besar dari alur logika Syari’ati di atas yang harus dijawab. Pertama, apakah mungkin, pada saat adanya seorang *imam*, pemerintah diserahkan kepada orang lain yang non-*imam*, tanpa menghilangkan ke-*imamahan* *imam* tersebut? Dalam pandangan Syari’ati, hubungan seorang pemimpin spritual, politik dan sosial dengan penguasa, sebagaimana halnya ada pada hubungan antara Gandhi dengan Nehru.

Bentuk seperti ini, di mata Syari'ati, adalah bentuk yang wajar, dan pemisahan antara kedua tugas tersebut dapat memberi jaminan bagi tetap terpeliharanya keagungan dan kehormatan *imam*, baik dalam aspek spritual maupun keilmuan, dan membebaskannya dari kekotoran dan keburukan pemerintah. Adapun yang dimaksud Syari'ati dengan pemisahan khilafah dan *imamah* (atribut/sifat) di atas adalah pada tataran realitas. Ada *imam* yang diakui oleh sekelompok orang, lalu kelompok yang lain memilih orang lain untuk menjadi khilafah. Di sini perlu diingatkan bahwa bagi Syari'ati imamah bukanlah jabatan tetapi atribut (sifat). Penunjukan atas orang lain sebagai khilafah di saat adanya imam, dapat disejajarkan dengan penerimaan terhadap seorang Nabi sebagai seorang Rasul, seperti yang diberlakukan pada Yesus dan menunjuk orang lain pada jabatan pemerintahan bagi bangsa Arab atau kaum muslim, sebagaimana halnya dengan Kaisar.

Berangkat dari bahwa *imam* adalah sifat (atribut), ketika yang bukan *imam* menjadi khalifah maka bukannya hak imam yang terampas, tetapi hak umat manusia. Seorang imam tetap menjadi imam meskipun ia tidak menjalankan kekuasaan duniawi. Yang terampas haknya (dari memperoleh manfaat atas kehadiran imam)

adalah makmum. Adalah hak umat untuk mendapat bimbingan dari imam dan bila ada "rekayasa" maka yang paling merugi adalah umat, karena umatlah yang termapas haknya.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan pengertian imamah yang terbatas ada masa hidup seorang *imam* dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Apakah imam tersebut harus dipilih oleh Allah atau Nabi sebagai pilihan yang harus pula diterima oleh umat manusia, kemudian di angkat sebagai imam untuk memimpin mereka dalam bidang politik, ataukah ia dipilih oleh manusia sendiri melalui musyawarah dan pemilihan umum? Persoalan ini bermuara pada dua prinsip pengangkatan dari Tuhan dan ijma' umat Islam.

Sejarah telah menjelaskan bahwa Syi'ah cenderung pada prinsip pertama dan Sunni cenderung pada prinsip kedua. Syari'ati menyerang prinsip kedua yang oleh Sunni dianggap telah menjadi unsur penting pada peristiwa *Saqifah*.

Menurut Syari'ati, dengan mengabaikan polemik hal-wasiat, di satu sisi, dan syura, bai'at, di sisi lain, dalam peristiwa *saqifah* hanya ada lima suara, dua suara dari khabilah Aus dan Khazraj, tiga suara dari Muhajirin, yakni Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Itu pun dengan catatan apabila pemimpin

kembali ke Aus, Sa'id bin Mu'adz, sudah tidak ada lagi, maka otomatis Sa'ad bin Ubaidah, pemimpin Kharaj, menjadi pemimpin tunggal orang Madinah menghadapi kelompok Mekkah, yang terakhir ini disebut Syari'ati telah memiliki kesadaran politik tinggi, sebagaimana terbukti pada akhirnya, di mana mereka (kelompok Mekah) atau betul apa yang sedang mereka hadapi, dan bagaimana pula seharusnya bertindak.

Syari'ati bermaksud mengatakan bahwa aspirasi dan kebutuhan penduduk madinah hanya ditemukan oleh lima suara, yang berarti mengabaikan ratusan suara lainnya, dalam peristiwa Saqifah. Bagi syari'ati, sesungguhnya prinsip bai'at, syura dan nash-wasiat tidaklah bertentangan sama sekali dan tidak pula ada di antara keduanya yang merupakan bid'ah dan tidak Islami. Baik bai'at, musyawarah, maupun ijma' (demokrasi) adalah salah satu kaidah Islamiyah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Tetapi, dengan adanya wasiat Rasulullah kepada Ali, umat harus melaksanakan wasiat ini dan menyerahkan persoalan mereka kepada washi (orang yang diberi wasiat), dan kalau itu tidak mekera lakukan, mereka akan tersesat.

Dalam pandangan Syari'ati, wasiat itu berfungsi sepanjang beberapa generasi sampai masyarakat dapat mandiri, dan

untuk seterusnya setelah berakhirnya *imamah* atau tahap wasiat dimulai tahap bai'at, musyawarah, dan ijma' atau apa yang disebut demokrasi. Dari sini dapat dikatakan bahwa para imam Syi'ah atau para *washi* Rasulullah berjumlah dua belas imam, tidak lebih. Sementara jumlah pemimpin masyarakat (politik) sesudah wafat Nabi hingga akhir sejarah jumlahnya tidak terbatas. Pada masa-masa awal wasiat digunakan dalam proses suksesi. Selanjutnya menurut Syari'ati, setelah pada tahun 250 H (tahun gaibnya Imam kedua belas) baru berlaku prinsip syura. Kalau ini berjalan mulus maka pada 250 H masyarakat Islam telah mempunyai masyarakat yang sempurna bentuknya, dan memiliki kelayakan yang membuatnya patut memilih pemimpin mereka yang paling baik melalui asas musyawarah, yang kemudian menduduki kursi kepemimpinan, dan menggerakkan sejarah sesuai dengan jalur yang telah digariskan oleh Muhammad Saw.

Masa sepeninggal Nabi sampai 250 H adalah masa revolusi yang tidak membutuhkan demokrasi. Sayangnya menurut Syari'ati, sesuatu yang terjadi tidak terduga telah muncul di Saqifah Bani Sa'idah dan menyeret perjalanan sejarah Islam ke arah lain. Syari'ati pun berandai-andai, kalau seandainya peristiwa Saqifah

itu terjadi pada 250 H dan tidak pada tahun 11H, niscaya sejarah akan lain bentuknya. Sebab, meminjam istilah Chandle, demokrasi bagi masyarakat belum maju merupakan musuh demokrasi itu sendiri.

3. Konsep Penantian Terhadap Imam Mahdi

Sebagaimana diketahui, salah satu doktrin Syi'ah adalah okultasi (*gaibiyah*) dan konsep "Penantian Juru Selamat" atau Imam Mahdi. Persoalan penantian dan kepercayaan terhadap 'Imam Akhir Zaman', selama ini dipandang dari tiga sudut pandang yang berbeda. Bagi seorang intelektual non-agamis, kepercayaan terhadap Messiah dan konsep penantian adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang mengarah pada kemerosotan moral.

Sedangkan dari sudut pandang sosial, konsep tentang messiah bertentangan dengan kemajuan dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, kaum Agamis mencoba menjelaskan dan mempertahankan kepercayaan terhadap konsep penantian Imam Akhir Zaman, serta menyangkal keberatan-keberatan berbagai pandangan kritis dan skeptis. Mereka mempunyai imam yang teguh terhadap konsep Messiah, serta tidak pernah meragukan kepercayaan ini, karena segala sesuatu yang diputuskan oleh tradisi agama,

Al-Qur'an dan Hadis, dan pernyataan-pernyataan yang disandarkan kepada para imam adalah selalu benar, tanpa adanya usaha untuk menganalisa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau menjelaskan makna historis dan sosialnya.

Berbeda dengan kedua kelompok tadi, kelompok modernis-agamis mencoba membuktikan konsep penantian terhadap Imam Mahdi dengan menggunakan sistem ilmu pengetahuan dan dalil materialistik agar konsep tersebut dapat diterima para intelektual masa kini. Para modernis-agamis tersebut mencoba mengubah sesuatu yang 'supranormal' menjadi sesuatu yang saintifik dan logis. Dengan bersandar pada bukti dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, mereka mencoba membuktikan bahwa manusia dapat dikatakan bahwa jangka waktu hidup Imam Mahdi adalah sesuatu yang normal dan sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Menurut Ali Syari'ati, apa yang dilakukan oleh ketiga kelompok tadi, untuk membuktikan kebenaran konsep Imam Mahdi, tidak membantu dalam memahami tentang konsep Penantian Imam Mahdi. Karena bagi Syari'ati, yang harus digali dan dipahami dari konsep tentang penantian Imam Mahdi adalah makna dan tujuan yang terkandung dalam konsep tersebut. Penantian terhadap datangnya Imam

Mahdi, menurut Syari'ati, memiliki dua jenis, yaitu, penantian negatif yang berarti ketertundukan dan pembenaran terhadap status quo, dan penantian positif yang progresif dan berorientasi ke masa depan.

Adapun penantian terhadap Imam Mahdi menjadi sesuatu yang negative apabila dipahami bahwa pembebasan kemanusiaan dan tegaknya keadilan hanya akan terjadi dengan munculnya juru Selamat yang sekarang dalam masa okultasi, tidak melalui usaha individu-individu atau lainnya. Pemahaman seperti ini akan menyebabkan kepercayaan bahwa kerusakan dan kezaliman yang terjadi merupakan sesuatu yang pasti dan alamiah, sehingga semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan demi keadilan dan perbaikan sosial adalah sia-sia dan tidak ada artinya. Penafsiran yang bersifat negatif terhadap konsep penantian tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para penguasa dan orang-orang yang mempraktikkan penindasan dan kezaliman, serta memperalat agama untuk kepentingan dan tujuan mereka, dan untuk memperoleh kekuasaan atas kehidupan intelektual dan materi.

Selanjutnya, menurut Syari'ati, konsep penantian Imam Mahdi bisa menjadi sesuatu yang positif, progresif dan berorientasi ke masa depan. Selain itu,

kepercayaan terhadap konsep Imam Mahdi dapat menjadi senjata ampuh dalam menghapus korupsi, kezaliman, dan bisa menjadi sumber energi terbesar bagi kemajuan di masa depan. Hal ini disebabkan karena alasan, antara lain:

1. Penantian adalah suatu prinsip sosio-intelektual dan naluri dasar manusia. Prinsip inilah yang menjadikan kepercayaan terhadap Messiah (al-Mahdi) telah ada sejak dahulu dalam sejarah manusia. Konsep ini merujuk pada suatu kepercayaan tentang Juru Selamat dan kebebasan yang dijanjikan. Sejarah menunjukkan bahwa umat manusia selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa keadilan, kebenaran, dan kebebasan pasti akan menang di masa yang akan datang.
2. Penantian adalah sintesis dari dua prinsip yang bertentangan, yaitu kebenaran dan kenyataan. Kebenaran yang dipercaya oleh manusia seringkali tidak sejalan dengan realitas yang terjadi. Sebagai contoh, umat Islam meyakini kebenaran bahwa Islam dianggap membebaskan manusia dan menegakkan keadilan, serta kemajuan, namun sebaliknya, Islam dalam prakteknya jauh dari apa yang diyakini. Oleh karena itu, kontradiksi antara realitas batil yang sedang berlaku dan

kebenaran yang tertindas yang membebaskan, hanya dapat dipecahkan melalui konsep “penantian” bagi kemenangan yang tentu dan pasti, tanpa mengingkari adanya harapan akan pencapaian kebebasan dan keadilan yang menyangkal eksistensi kebenaran, serta tanpa memasrahkan diri terhadap apa yang telah terjadi.

3. Menanti adalah ketentuan sejarah. Sejarah, sebagai mana masyarakat, mempunyai suatu kemerdekaan hidup atas individu. Kepercayaan bahwa sejarah pasti akan berakhir dengan kemenangan massa, keadilan dan persamaan, adalah sumber terbesar kekuatan moral bagi kaum tertindas, memberikan keyakinan kepada kemenangan terakhir dan peniadaan sistem penindasan yang sedang terjadi. Kepercayaan bahwa konsep penantian secara historis telah ditetapkan akan memperlihatkan adanya perbedaan antara pesisme sejarah (penantian negatif) dan optimisme sejarah (penantian positif).
4. Penantian menghasilkan kelanjutan sejarah. Dalam Syi’ah, konsep penantian menghubungkan tiga periode, yaitu periode *nubuwwah*, *imamah*, dan periode okultasi (kegaiban). Dalam hal ini, prinsip perwakilan imam memenuhi

suatu peranan yang sangat progresif dan menunjukkan bagaimana periode nubuwah, kemudian imamah, dan selanjutnya ilmu (kesadaran yang didasarkan atas wewenang imam yang terakhir) yang saling terkait dan memberikan penjelasan yang logis dan saintifik tentang perjalanan sejarah, dari permulaan sampai akhir masa.

Dari penjelasan di atas, menurut Syari’ati, dapat dikatakan bahwa kepercayaan terhadap konsep “penantian” merupakan sebuah optimisme sejarah, kelanjutan sejarah dan determinisme. Kepercayaan terhadap konsep penantian adalah sebuah falsafah sejarah yang positif, ketetapan sejarah, suatu bentuk optimism filosofis. Dan suatu kekuatan gerakan spiritual dan intelektual yang membawa janji dan tanggung jawab pada jalurnya. Sebaliknya, filsafat penyerahan yang negatif, pesimistik dan meyerah akan membawa umat Islam menuju kehancuran.

C. Analisis terhadap Pemikiran Ali Syari’ati tentang Konsep *Imamah*

Ali Syari’ati mengatakan bahwa *ummah dan imamah* merupakan prinsip akidah Islamiyah yang paling penting dan terkenal, khususnya di kalangan mazhab Syi’ah. Hal ini karena Syi’ah, sebagaimana dikatakan

Thabathaba'i, memiliki pandangan bahwa seorang imam telah ditunjuk oleh Allah SWT. Sepeninggal Rasulullah SAW. Dengan tujuan untuk menegakkan budaya dan hukum-hukum agama dan membimbing umat di jalan kebenaran. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila konsep kepemimpinan dalam Islam (*imamah*) mendapat perhatian lebih banyak pada kelompok Syi'ah dibandingkan kelompok Sunni.

Hamid Enayat, sebagaimana dikutip Nadirsyah Hosen, membedakan khilafah dan *imamah* sebagai kata kunci memahami paradigma politik Sunni dan Syi'ah, disamping kata kunci lain seperti *wilayah* dan *ishmah* (*syi'ah*), *ijma'* dan *bai'at* (*sunni*). Tetapi perbedaan istilah *imamah* dan *khalifah* sesungguhnya hanya berlaku dalam makna aplikatif dan sistematis, bukan pada tataran teoritis. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh al-mawardi, bahwa *imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Artinya khilafah dan *imamah* dalam makna yang belum memperoleh sentuhan politis adalah satu makna. Ini berarti mengatakan tidak mungkin ada *ummah* tanpa *imamah*, seperti yang disimpulkan Syari'ati sama maknanya dengan pernyataan, tiada *ummah* tanpa khalifah.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ali Syari'ati, imam merupakan sifat atau atribut yang melekat pada diri seseorang. Seseorang

imam tidak perlu dipilih karena imam bukanlah sebuah jabatan. Dipilih atau tidak ia tetap sebagai imam. Syari'ati dengan tegas ingin mengatakan bahwa ada seseorang yang ditakdirkan dan dilahirkan untuk jadi imam, yakni melekatnya sifat atau atribut imam itu. Nabi Muhammad memberitahu umat melalui wasiatnya. Lalu kita pun mengetahui bahwa seseorang itu memiliki sifat seorang imam.

Kesimpulan Ali Syari'ati tersebut, secara tidak langsung, menjadikannya tidak konsisten dengan paradigma berpikirnya, karena makna imam yang ia ketengahkan tetap bergantung pada adanya wasiat. Imam memiliki kekuasaan atas dasar wewenang yang diperoleh dari wasiat. Padahal dari awal Syari'ati telah menegaskan bahwa salah satu ciri penting yang ingin ia tegaskan dalam kajiannya adalah pendekatan sosiologis terhadap masalah *ummah* dan *imamah*. Mengaitkan imam dengan wasiat telah meruntuhkan bangunan logikanya yang dibangun dengan pendekatan sosiologis. Namun demikian, Syari'ati cukup konsisten dengan alur logikanya ketika ia berpendapat jika imam tidak dipilih untuk memimpin umat, maka yang terampas adalah hak umat (dari memperoleh manfaat atas kehadiran imam) bukan hak imam.

Selanjutnya Syari'ati berusaha mensintesis teori musyawarah Sunni dan wasiat Syi'ah dengan menyatakan bahwa

prinsip bai'at-syura dan nash wasiat tidaklah bertentangan sama sekali dan tidak pula ada di antara keduanya yang merupakan bid'ah dan tidak Islami. Yang membedakan keduanya adalah waktu dan kondisi umat. Sepeninggal Nabi "baya" umat belumlah kokoh dan kuat hingga tidak mungkin dapat menentukan nasibnya sendiri. Umat membutuhkan wasiat untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Kelak saat kondisi umat telah matang, wasiat tidak dibutuhkan lagi dan musyawarahlah jalan yang tepat. Dalam rentang waktu 11 H sampai dengan 250 H yang dibutuhkan adalah mekanisme wasiat, pertama dari Nabi kemudian dari Imam yang terdahulu. Angka 250 H dipilih Syari'ati karena pada tahun itulah Imam Mahdi (imam kedua belas dalam kepercayaan Syi'ah *Imamiyah Itsna Asy'ariyah*) gaib dan akan kembali nanti di akhir zaman. Setelah 250H mekanisme yang digunakan adalah musyawarah.

Kesimpulan Syari'ati tersebut, menurut Nadirsyah Hosen, terlalu terburu-buru, karena, sebagaimana anggapan Robert N. Bellah, masyarakat pada masa itu telah menghasilkan sesuatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. Tetapi karena prasarana sosialnya pada bangsa Arab dan dunia saat itu belum siap, maka sistem kekhalifahan Islam itu tidak bertahan lama dan diganti dengan sistem "kerajaan" Bani Umayyah.

Selain itu, mekanisme wasiat tidak menjamin hilangnya perpecahan. Apabila dianggap kelompok Syi'ah merupakan kelompok yang representatif dalam mekanisme wasiat, maka yang terlihat adalah ketidakjelasan subjek penerima wasiat setelah Imam Husein. Dan ini menyebabkan Syiah terpecah ke dalam beberapa kelompok, seperti Imamiyah, Kaisaniyah, Zaidiyah, dan Ismailiyah, dan saling mengklaim telah menerima wasiat. Terlepas dari kekurangan – kekurangannya, tidak dapat disangkal bahwa apa yang diusahakan Ali Syari'ati untuk merekonstruksi doktrin-doktrin keagamaan, khususnya dalam masalah imamah, sangatlah menarik dan patut diberikan apresiasi yang memadai. Hal ini karena pisau sosiologis yang dikedepankannya membuat ia berbeda dengan pakar lain yang terpaku pada *nash-nash* dan doktrin mapan lainnya. Selain itu, pentingnya melihat bacaan ulang Syari'ati terletak pada usahanya untuk menurunkan "derajat" pembahasan dari sesuatu yang bersifat transenden kepada kajian yang bersifat profan dan realis.

Pemikiran Ali Syari'ati tersebut tidak terlepas dari latar belakang kehidupan dan pendidikannya. Latar belakang keluarga yang religius, terutama pengaruh sang ayah sebagai seorang guru dan mujahid besar di Masyhad, sangat terasa dalam pembentukan sosok Syari'ati. Hal ini diakui sendiri oleh Syari'ati

dalam bukunya, Kafir, sebagaimana dikutip oleh Ghulam Tawassuli, Ayah saya adalah orang pertama yang meletakkan batu bagi wawasan nasionalisme dalam jiwa saya. Dia mengajari saya tentang pemikiran dan seni kemanusiaan. Tentang rasa kebebasan, harga diri, kemerdekaan kalbu, keteguhan iman.⁶ Perkenalannya dengan para tokoh-tokoh dan penulis filosofis, seperti Bergson, Albert Camus, Sartre,⁷ Schwartz, para sosiolog seperti Gurvitsch,⁸ Berque,⁹ dan juga para *Islamolog* seperti Lois Massignon, sewaktu Syari'ati kuliah di Perancis, juga mewarnai pemikirannya.

Hal-hal tersebut terlihat dari pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisannya. Meskipun ia menyerukan untuk berpegang teguh pada ajaran Islam, namun tulisan-tulisannya memuat epistemologi, dasar-dasar filsafat dan sejarah, serta prinsip-prinsip sosiologi dalam bentuknya yang jelas, yang didukung oleh usaha untuk mengembangkan dialektika secara konsisten.

Analisa dan pemikiran Syari'ati telah menunjukkan bahwa Islam bukanlah ideologi kemanusiaan yang terbatas pada tempat dan waktu tertentu saja, akan tetapi Islam merupakan gelombang yang terus mengalir di sepanjang sejarah manusia. Baginya, semua bentuk keislaman yang bercorak kemazhaban dan lokal, tidaklah mempunyai nilai yang berarti, tetapi yang

memiliki nilai yang penting adalah "Islam yang sadar dan Bangkit".¹⁰

D. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dibahas dari penelitian mengenai "Konsep *Imamah* menurut Ali Syari'ati" ini, maka dapatlah penulis tarik beberapa kesimpulan terkait dengan penelitian ini, yakni:

1. Islam dalam pandangan Syari'ati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spritual dan moral atau hanya sekedar hubungan antara hamba dengan Sang Khaliq (*Hablu min Allah*), tetapi lebih dari itu, Islam adalah sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Ia berkeyakinan bahwa Islam sebagai suatu mazhab sosiologi ilmiah harus difungsikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat tertindas, baik secara kultural maupun politik. Pemikiran Ali Syari'ati tersebut tidak terlepas dari latar belakang keluarga yang religius, terutama pengaruh sang ayah sebagai seorang guru dan mujahid besar Masyhad, sangat tersa dalam pembentukan sosok Syari'ati. Perkenalannya dengan para tokoh-tokoh dan penulis filosofis, seperti Bergson, Albert Camus, Sartre, Schwartz, para sosiolog seperti Gurvitsch, Berque, dan juga para *Islamolog* seperti Louis Massignon, sewaktu Syari'ati kuliah di Perancis, juga mewarnai pemikirannya

2. Imamah menurut Ali Syari'ati adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya yang berfungsi untuk membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Jadi, imamah merupakan manifestasi dari 'risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat' dari "apa yang kini ada" (*das sein*) menuju "apa yang seharusnya ada" (*das sollen*) semaksimal yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas dasar konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya.
3. Pengaruh pemikiran Ali Syari'ati sendiri yakni dalam membangun revolusi di Iran sangatlah besar baik melalui ide-idenya maupun aksinya. Ali Syari'ati juga di kenal sebagai seorang yang multidimensi dan multi inter pretable.

Daftar Kepustakaan

- Ali Syari'ati, *What Is To Be Done: The Enlightened and Thinkers and Islamic Renaissance*. Terj. Farhang Rajaee Houston: IRIS, 1996
- Azyumardi Azra, *Akar-akar Ideologis Revolusi Iran: Filsafat Pergerakan Ali Syari'ati*, dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Islam Politik: Dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Dikutip dari Muhammad Nafis "Dari Cengkraman penjara Ego memburu Revolusi: memahami Kemelut Tokoh Pemberontak", dalam M. Deden Ridwan (ed). *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati dalam sorotan cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Lentera, 1999
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ali Syari'ati, *Ideologi dan Kaum Intelektual; Suatu Wawasan Islam*, peny. Syafiq Basri dan Haidarbagir Bandung: Mizan, 1993
- Syari'ati, "Man and Islam", dalam <http://www.shariati.com>.
- Syari'ati, *Tugas cendekiawan Muslim*, terj. Amien Rais (Jakarta: Srigunting. 2001
- Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis*, terj. Afif

Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995)

Ali Syari'ati, *Islam mazhab Pemikiran Aksi* (Bandung: Mizan, 1992)

Ali Syari'ati, *Para Pemimpin Mustadh'afin; Sejarah Panjang Perjuangan Melawan Penindasan dan kezaliman* (Bandung: Muthahhari Paperback, 2001)

Nadirsyah Hosen. "*Ketika Wasiat dan Syura Berganti Posisi: Beberapa Catatan untuk Ali Syari'ati*". Dalam www.isnet.com

Nadirsyah Hosen. "*Ketika wasiat dan Syura...*", Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina. 1992)